

Analisis Potensi Pendapatan dan Kemandirian Daerah di Kawasan Arek Jawa Timur

Khubbi Abdillah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Putra

Diterima: 11 Oktober, 2023 | Revisi: 11 Desember, 2023 | Diterbitkan: 11 Januari 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya potensi pendapatan dan kemandirian daerah di kawasan arek di provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – 2021, dengan perhitungan analisis Location Quotient, derajat desentralisasi fiskal, dan indeks kapasitas fiskal daerah. Dari hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa Kota Batu memiliki LQ tertinggi pada sektor jasa lainnya. Analisis derajat desentralisasi fiskal dan indeks kapasitas fiskal daerah tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya. Hasil Penelitian merekomendasikan bahwa pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi ekonomi sebagai sumber penerimaan pajak, meningkatkan PAD agar tidak tergantung pada transfer dari pemerintah pusat, dan meningkatkan kemampuan daerah dengan memperluas basis pajak baru untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Kata Kunci: Location Quotient, Derajat Desentralisasi Fiskal, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Analysis of Income Potential and Regional Independence in the Arek Region, East Java

ABSTRACT

arek region in East Java Province in 2017 – 2021, by calculating the Location Quotient analysis, the degree of fiscal decentralization, and the regional fiscal capacity index. The results of the LQ calculation show that Batu City has the highest LQ in other service sectors. Analysis of the highest degree of fiscal decentralization and regional fiscal capacity index is owned by Surabaya City. The research results recommend that local governments need to optimize their economic potential as a source of tax revenue, increase local own-source revenue (PAD) so that they're not dependent on transfers from central government, and increase regional capabilities by expanding a new tax base to finance government spending.

Keywords: LQ, Degree of Fiscal Decentralization, Regional Fiscal Capacity Index

*Corresponding Author:

Email : khubbiabdillah@uwp.ac.id

Alamat : Jl. Pd. Benowo Indah No.1-3, Babat
Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
60197



This article is published under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Dilihat dari karakter budaya, kawasan arek dibagi menjadi 11 wilayah antara lain: Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jombang, Kota Malang, dan Kabupaten Mojokerto. Kawasan arek, secara administratif berada di Provinsi Jawa Timur. Kebudayaan arek memiliki ciri khas yang memiliki karakter semangat pantang menyerah, terbuka dengan perubahan zaman, mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar (Sutarto & Sudikan, 2008). Kondisi kehidupan sosial di wilayah Arek yang begitu kompleks mendorong adanya kegiatan sektor ekonomi yang begitu pesat. Hal ini memicu adanya potensi pendapatan daerah yang dapat digali dan mendorong kemandirian daerah dalam mengelola keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan di kawasan Arek Jawa Timur.

Tabel 1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kawasan Arek Jawa Timur Tahun 2017-2021

| No | Kabupaten/Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Kota Surabaya | 81,07 | 81,74 | 82,22 | 82,23 | 82,31 |
| 2 | Kab Sidoarjo | 78,70 | 79,50 | 80,05 | 80,29 | 80,65 |
| 3 | Kota Pasuruan | 74,39 | 74,78 | 75,25 | 75,26 | 75,62 |
| 4 | Kota Mojokerto | 76,77 | 77,14 | 77,96 | 78,04 | 78,43 |
| 5 | Kab Malang | 68,47 | 69,40 | 70,35 | 70,36 | 70,60 |
| 6 | Kota Batu | 74,26 | 75,04 | 75,88 | 75,90 | 76,28 |
| 7 | Kab Gresik | 74,84 | 75,28 | 76,10 | 76,11 | 76,50 |
| 8 | Kab Pasuruan | 66,69 | 67,41 | 68,29 | 68,60 | 68,93 |
| 9 | Kab Jombang | 70,88 | 71,86 | 72,85 | 72,97 | 73,45 |
| 10 | Kota Malang | 80,65 | 80,89 | 81,32 | 81,45 | 82,04 |
| 11 | Kab Mojokerto | 72,36 | 72,64 | 73,53 | 73,83 | 74,15 |

Sumber: BPS Jawa Timur

Tabel 1 menunjukkan perkembangan indeks pembangunan manusia di kawasan Arek Jawa Timur. Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan *proxy* dari kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi IPM, menunjukkan wilayah yang semakin sejahtera. Pengelompokan klasifikasi IPM yang tergolong sangat tinggi di kawasan Arek yaitu Kota Surabaya dan Kota Malang yang memiliki rata-rata skor IPM diatas 80. Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan tergolong wilayah yang memiliki skor

IPM sedang, karena skor IPM rata-ratanya berada diantara 60 sampai 70. Sisanya, 7 kabupaten/kota lain memiliki skor IPM tinggi.

Analisis potensi pendapatan di-*proxy* dengan perhitungan sektor basis *Location Quotient* (LQ) (Mahmudi 2020). Sedangkan, kemandirian daerah dapat dihitung dengan derajat desentralisasi fiskal dan indeks kemampuan fiskal daerah (Halim, 2004). Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan daerah memiliki kemampuan dalam menggali potensi pendapatan, mengelola keuangan dan menggunakan uang tersebut untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung (Permendagri No 13 Tahun 2006).

Tabel 2

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Arek Jawa Timur Tahun 2017-2021

| No | Kabupaten/Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|----------------|------|------|------|-------|------|
| 1 | Kota Surabaya | 5,68 | 5,79 | 5,66 | -4,05 | 4,03 |
| 2 | Kab Sidoarjo | 4,20 | 4,43 | 4,27 | 4,33 | 3,63 |
| 3 | Kota Pasuruan | 4,67 | 4,80 | 4,78 | -7,55 | 2,66 |
| 4 | Kota Mojokerto | 4,93 | 4,97 | 4,69 | -5,67 | 2,80 |
| 5 | Kab Malang | 4,78 | 4,93 | 4,84 | -4,24 | 2,42 |
| 6 | Kota Batu | 5,69 | 5,57 | 5,50 | -8,56 | 3,02 |
| 7 | Kab Gresik | 4,65 | 4,67 | 4,20 | -3,24 | 2,83 |
| 8 | Kab Pasuruan | 4,95 | 4,99 | 5,06 | -0,56 | 3,86 |
| 9 | Kab Jombang | 4,88 | 4,83 | 4,66 | -5,84 | 2,45 |
| 10 | Kota Malang | 5,08 | 5,14 | 5,12 | 0,93 | 4,05 |
| 11 | Kab Mojokerto | 4,82 | 5,00 | 4,87 | -1,00 | 3,36 |

Sumber: BPS Jawa Timur

Selain itu, tolok ukur kemandirian daerah bisa dilihat dari besarnya indeks kapasitas fiskal daerah. Indeks kapasitas fiskal daerah merupakan indeks yang mengukur seberapa besar kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan daerahnya untuk belanja publik sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat (UU No 33 Tahun 2004).

Menurut Tabel 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 11 kabupaten/kota di kawasan Arek cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2019. Pada tahun 2020, hampir semua kabupaten/kota mengalami pertumbuhan ekonomi negatif akibat adanya pandemi covid-19, kecuali Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Arek mulai bangkit dan meningkat secara positif pada tahun 2021 karena adanya program vaksin gratis dari pemerintah kepada

masyarakat untuk mencegah penularan wabah virus dan memulihkan kondisi ekonomi yang sempat lumpuh serta adanya pelanggaran kegiatan sektor ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pendapatan yang diukur dengan *Location Quotient* (LQ). Sedangkan, kemandirian daerah diukur dengan derajat desentralisasi fiskal dan indeks kapasitas fiskal daerah. Objek penelitian ini berada di kawasan Arek Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 11 kabupaten/kota yang terdiri dari Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jombang, Kota Malang, dan Kabupaten Mojokerto selama periode 2017 sampai 2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Terkait dengan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota Tahun 2017 – 2021, PDRB kabupen/kota, Provinsi Jawa Timur menurut lapangan usaha Tahun 2017 – 2021. Metode teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a) Potensi pendapatan daerah

Analisis potensi pendapatan dapat diukur dengan perhitungan *Location Quotient* (LQ) (Yogi, dkk, 2022). Rumus yang dipakai yaitu:

$$LQ = \frac{v_i}{vt} \div \frac{V_i}{V_t}$$

Keterangan:

LQ : LQ dari sektor i kab/kota di provinsi Jatim

v_i : PDRB sektor i kab/kota di Provinsi Jatim

vt : PDRB total sektor kab/kota di Provinsi Jatim

V_i : PDRB sektor i Provinsi Jatim

V_t : PDRB total sektor Provinsi Jatim

b) Derajat desentralisasi fiskal

Menurut Halim (2004), analisis derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan rumus:

$$DDF = PAD \div TPD$$

Keterangan:

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

TPD : Total Penerimaan Daerah

c) Indeks kapasitas fiskal daerah

Analisis kapasitas fiskal dapat dihitung dengan indeks kapasitas fiskal daerah dengan rumus:

$$IKFD_{\frac{kab_i}{kota}} = KFD_{\frac{kab_i}{kota}} \div \left(\frac{\sum KFD_{\frac{kab_i}{kota}}}{n} \right)$$

Keterangan

$IKFD_{\frac{kab_i}{kota}}$: Indeks kapasitas fiskal daerah kab/kota.

$KFD_{\frac{kab}{kota}i}$: Kapasitas fiskal daerah kab/kota.

$(\sum KFD_{\frac{kab}{kota}i} / n)$: Total kapasitas fiskal daerah kab/kota.

n : 508 daerah kab/kota

Kapasitas fiskal daerah dapat dihitung dengan pendapatan - (pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu). Pendapatan yaitu PAD ditambah pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berbeda dengan pendapatan yang sudah ditentukan meliputi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, DAK khusus dan non-fisik, dana otonomi khusus, dana desa, dan hibah. Sedangkan, belanja tertentu yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja bagi hasil, dan ADD (PMK RI Nomor 116/PMK.07/2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Keterangan Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata nilai potensi ekonomi daerah 11 kabupaten/kota di kawasan arek Tahun 2017 - 2021 yang diukur dengan *Location Quotient* (LQ) menunjukkan bahwa:

- Kawasan Surabaya Raya terdiri dari Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Hasil perhitungan potensi ekonomi di Kota Surabaya sebanyak 10 sektor basis. Sektor basis yang memiliki LQ tertinggi adalah sektor jasa perusahaan sebesar 2,76. Sektor basis di Kabupaten Sidoarjo yaitu industri pengolahan, pengadaan listrik gas, dan transportasi pergudangan. Sektor basis tertinggi yaitu sektor pengadaan listrik gas sebesar 1,91. Sektor unggulan yang menempati kuadran pertama dimiliki oleh Kota Surabaya pada sektor transportasi pergudangan dan Kabupaten Gresik pada sektor pertambangan penggalian.
- Kawasan Malang Raya terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Kota Malang dan Kabupaten Malang memiliki masing-masing 8 sektor basis dan 6 sektor basis. Kabupaten Malang memiliki rata-rata LQ < 2. Sedangkan, Kota Malang memiliki rata-rata sektor basis terbesar sebesar 4,08 pada sektor jasa kesehatan, kegiatan sosial, diikuti sektor jasa pendidikan sebesar 2,99 dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, daur ulang sebesar 2,16. Potensi ekonomi di Kota Batu sebanyak 12 sektor basis dan sektor jasa lainnya menempati skor LQ tertinggi sebesar 12,11.
- Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto. Kota Mojokerto memiliki potensi ekonomi sebanyak 11 sektor basis. Sedangkan, Kabupaten Mojokerto memiliki 3 sektor basis yaitu industri pengolahan (1,84), informasi komunikasi (1,13), jasa keuangan, asuransi (1,02).
- Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Potensi ekonomi yang dimiliki Kota Pasuruan sebanyak 10 sektor basis, dengan rata-rata LQ terbesar pada sektor jasa keuangan, asuransi sebesar 2,89. Berbeda dengan Kabupaten Pasuruan yang memiliki potensi ekonomi sebanyak 3 sektor basis, yaitu sektor industri pengolahan (1,98), sektor pengadaan listrik, gas (2,64), dan sektor konstruksi (1,27).
- Kabupaten Jombang memiliki rata-rata LQ sebanyak 9 sektor basis. Sektor basis tertinggi di Kabupaten Jombang adalah sektor jasa pendidikan dengan skor rata-rata LQ sebesar 2,03 selama periode 2017 - 2021. Skor rata-rata LQ terbesar kedua yaitu sektor pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 1,57, diikuti sektor administrasi

pemerintahan, pertahanan, jaminan wajib sosial (1,51) dan sektor jasa kesehatan, kegiatan sosial (1,38).

Tabel 3
Rata-rata Potensi Ekonomi Kawasan Arek Jawa Timur Tahun 2017-2021

| No | Kab/Kota | Sektor | LQ | No | Kab/Kota | Sektor | LQ |
|----|---------------|--------|------|----|--------------|--------|-------|
| 1 | Kota Surabaya | 4 | 1,36 | 6 | Kota Batu | 1 | 1,31 |
| | | 5 | 1,55 | | | 5 | 1,93 |
| | | 6 | 1,07 | | | 6 | 1,25 |
| | | 7 | 1,52 | | | 7 | 1,06 |
| | | 8 | 1,73 | | | 9 | 1,88 |
| | | 9 | 2,76 | | | 10 | 1,29 |
| | | 10 | 1,14 | | | 11 | 1,38 |
| | | 11 | 1,88 | | | 12 | 1,73 |
| | | 12 | 1,53 | | | 14 | 1,09 |
| | | 13 | 2,93 | | | 15 | 1,45 |
| 2 | Kab Sidoarjo | 3 | 1,72 | | | 16 | 1,17 |
| | | 4 | 2,79 | | | 17 | 12,11 |
| | | 8 | 2,29 | 7 | Kab Gresik | 2 | 1,88 |
| 3 | Kota Pasuruan | 5 | 2,63 | | | 3 | 1,61 |
| | | 7 | 1,53 | | | 4 | 1,91 |
| | | 8 | 2,06 | | | 6 | 1,02 |
| | | 10 | 1,63 | 8 | Kab Pasuruan | 3 | 1,98 |
| | | 11 | 2,89 | | | 4 | 2,64 |
| | | 12 | 1,46 | | | 6 | 1,27 |
| | | 14 | 1,98 | 9 | Kab Jombang | 1 | 1,57 |

| No | Kab/Kota | Sektor | LQ | No | Kab/Kota | Sektor | LQ | | |
|----|----------------|--------|------|----|----------|--------|---------------|----|------|
| | | 15 | 1,59 | | | 6 | 1,03 | | |
| | | 16 | 1,37 | | | 7 | 1,32 | | |
| | | 17 | 2,00 | | | 10 | 1,35 | | |
| 4 | Kota Mojokerto | 5 | 1,34 | | | 12 | 1,29 | | |
| | | 6 | 1,16 | | | 14 | 1,51 | | |
| | | 7 | 1,59 | | | 15 | 2,03 | | |
| | | 9 | 1,19 | | | 16 | 1,38 | | |
| | | 10 | 2,50 | | | 17 | 1,18 | | |
| | | 11 | 2,85 | | | 10 | Kota Malang | 5 | 2,16 |
| | | 12 | 1,58 | | | | | 6 | 1,42 |
| | | 14 | 2,04 | | | | | 7 | 1,68 |
| | | 15 | 1,61 | | | | | 11 | 1,03 |
| 16 | 1,75 | 13 | 1,00 | | | | | | |
| 17 | 2,59 | 15 | 2,99 | | | | | | |
| 5 | Kab Malang | 1 | 1,43 | 16 | 4,08 | | | | |
| | | 3 | 1,72 | | | 17 | 2,11 | | |
| | | 5 | 1,04 | | | 11 | Kab Mojokerto | 3 | 1,84 |
| | | 6 | 1,31 | | | | | 10 | 1,13 |
| | | 7 | 1,05 | | | | | 11 | 1,02 |
| | | 17 | 1,44 | | | | | | |

Sumber: BPS Jawa Timur, diolah

Tabel 4
Derajat Desentralisasi Fiskal Kawasan Arek Jawa Timur Tahun 2017-2021

| No | Kabupaten/Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Rata-rata |
|----|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 1 | Kota Surabaya | 0,569 | 0,531 | 0,540 | 0,514 | 0,880 | 0,607 |
| 2 | Kab Sidoarjo | 0,360 | 0,323 | 0,308 | 0,324 | 0,302 | 0,324 |
| 3 | Kota Pasuruan | 0,155 | 0,148 | 0,144 | 0,138 | 0,125 | 0,142 |
| 4 | Kota Mojokerto | 0,208 | 0,190 | 0,185 | 0,223 | 0,194 | 0,200 |
| 5 | Kab Malang | 0,188 | 0,143 | 0,139 | 0,136 | 0,166 | 0,154 |
| 6 | Kota Batu | 0,159 | 0,145 | 0,146 | 0,114 | 0,183 | 0,149 |
| 7 | Kab Gresik | 0,310 | 0,315 | 0,282 | 0,272 | 0,330 | 0,302 |
| 8 | Kab Pasuruan | 0,234 | 0,185 | 0,171 | 0,199 | 0,209 | 0,200 |
| 9 | Kab Jombang | 0,190 | 0,153 | 0,150 | 0,154 | 0,170 | 0,164 |
| 10 | Kota Malang | 0,258 | 0,228 | 0,247 | 0,182 | 0,302 | 0,243 |
| 11 | Kab Mojokerto | 0,191 | 0,200 | 0,189 | 0,195 | 0,208 | 0,197 |

Sumber: BPS Jawa Timur, diolah

Tabel 4 menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal di 11 kabupaten/Kota di kawasan Arek yang diukur dengan rasio PAD terhadap TPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kawasan Surabaya Raya yang memiliki rata-rata derajat desentralisasi fiskal tertinggi dimiliki Kota Surabaya sebesar 60%. Berbeda dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik yang memiliki *trend* rasio PAD terhadap TPD cenderung konstan dari tahun 2017 sampai 2021. Rata-rata derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik tergolong daerah yang memiliki kemampuan keuangan rendah yaitu masing-masing sebesar 32% dan 30%. Kemampuan keuangan dikatakan rendah jika derajat desentralisasi fiskal berada diantara 25% sampai 50%.
- b. Kawasan Malang Raya memiliki rata-rata derajat desentralisasi fiskal Tahun 2017 – 2021 yaitu: Kota Malang 24%, Kabupaten Malang 15%, dan Kota Batu 14%. Daerah Malang Raya termasuk dalam kategori daerah yang memiliki kemampuan keuangan rendah sekali yang berkisar antara 0 – 25%.
- c. Kota Mojokerto memiliki rata-rata derajat desentralisasi fiskal sebesar 20%. Sedangkan, Kota Mojokerto memiliki rata-rata derajat desentralisasi fiskal sebesar 19%. Derajat desentralisasi fiskal di Kota Mojokerto maupun Kabupaten Mojokerto memiliki selisih 1% dan termasuk daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang rendah sekali.

- d. Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan memiliki *trend* rasio PAD terhadap TPD cenderung fluktuatif dari tahun 2017 sampai 2021. Kabupaten Pasuruan memiliki rata-rata derajat desentralisasi fiskal sebesar 20%. Sedangkan Kota Pasuruan memiliki rata-rata derajat desentralisasi fiskal terendah dibandingkan 10 kabupaten/kota lain di kawasan Arek yaitu sebesar 14%.
- e. Kabupaten Jombang memiliki *trend* derajat desentralisasi fiskal cenderung menurun dari tahun 2017 sampai 2020. Namun, derajat desentralisasi fiskal meningkat pada tahun 2021. Rata-rata derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Jombang sebesar 17%. Kabupaten Jombang tergolong daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang rendah sekali.

Tabel 5

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kawasan Arek Jawa Timur Tahun 2017-2021

| No | Kabupaten/Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Rata-rata |
|----|----------------|------|------|------|------|-------|-----------|
| 1 | Kota Surabaya | 8,53 | 8,52 | 9,68 | 7,67 | 10,08 | 8,90 |
| 2 | Kab Sidoarjo | 3,61 | 2,68 | 3,26 | 2,96 | 3,30 | 3,16 |
| 3 | Kota Pasuruan | 0,68 | 0,67 | 0,62 | 0,49 | 0,55 | 0,60 |
| 4 | Kota Mojokerto | 0,73 | 0,82 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,78 |
| 5 | Kab Malang | 2,71 | 2,08 | 2,03 | 1,64 | 2,37 | 2,17 |
| 6 | Kota Batu | 0,71 | 0,84 | 0,67 | 0,69 | 0,79 | 0,74 |
| 7 | Kab Gresik | 2,54 | 2,13 | 2,38 | 2,35 | 2,87 | 2,45 |
| 8 | Kab Pasuruan | 1,56 | 1,84 | 1,72 | 2,61 | 2,09 | 1,96 |
| 9 | Kab Jombang | 1,73 | 1,40 | 1,31 | 1,24 | 1,43 | 1,42 |
| 10 | Kota Malang | 1,54 | 1,61 | 1,58 | 1,34 | 1,98 | 1,61 |
| 11 | Kab Mojokerto | 1,76 | 1,41 | 1,45 | 1,49 | 1,43 | 1,51 |

Sumber: BPS Jawa Timur, diolah

Menurut Tabel 5 menunjukkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) di kawasan Arek Jawa Timur Tahun 2017 - 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kawasan Surabaya Raya yang memiliki Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) tertinggi adalah Kota Surabaya sebesar 10,08, diikuti Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik masing-masing sebesar 3,16 dan 2,45. Daerah Surabaya Raya termasuk kategori yang memiliki kapasitas fiskal daerah yang sangat tinggi.
- b. Kawasan Malang Raya yang termasuk dalam kategori IKFD sangat tinggi yaitu Kabupaten Malang sebesar 2,17. Kota Malang termasuk dalam kategori IKFD tinggi sebesar 1,61. Berbeda dengan Kota Batu yang tergolong dalam kategori IKFD sedang sebesar 0,74.

- c. Kabupaten Mojokerto memiliki rata-rata skor IKFD sebesar 1,51. Hal tersebut termasuk kategori IKFD tinggi. IKFD tinggi berkisar antara 1,053 sampai 1,838. Berbeda dengan Kota Mojokerto yang memiliki rata-rata skor IKFD sebesar 0,78. Hal tersebut termasuk kategori IKFD sedang. IKFD sedang berkisar antara 0,727 sampai 1,052.
- d. Kabupaten Pasuruan memiliki *trend* pergerakan IKFD yang cenderung meningkat dari tahun 2017 sampai 2020. Namun, pada tahun 2021 skor IKFD mengalami penurunan. Berbeda dengan Kota Pasuruan yang memiliki kecenderungan IKFD yang menurun dari tahun ke tahun. Kabupaten Pasuruan memiliki rata-rata IKFD kategori sangat tinggi sebesar 1,96. Sedangkan Kota Pasuruan memiliki rata-rata IKFD kategori rendah dibandingkan 10 kabupaten/kota lain sebesar 0,60.
- e. Kabupaten Jombang memiliki *trend* IKFD yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Rata-rata IKFD kabupaten Jombang sebesar 1,42. Hal tersebut menunjukkan IKFD kategori tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dari 11 kabupaten/kota kawasan Arek yang memiliki rata-rata potensi ekonomi dengan urutan 7 *Location Quotient* (LQ) tertinggi yaitu dimiliki oleh Kota Batu pada sektor jasa lainnya sebesar 12,11, diikuti oleh sektor jasa kesehatan, kegiatan sosial dan jasa pendidikan di Kota Malang. Urutan keempat potensi ekonomi tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya pada sektor jasa perusahaan. Urutan kelima dan keenam dengan potensi ekonomi tertinggi yaitu sektor jasa keuangan asuransi di Kota Pasuruan dan Kota Mojokerto. Sektor pengadaan listrik, gas merupakan potensi ekonomi di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki nilai LQ terbesar urutan ketujuh. Sisanya, sebanyak 72 sektor basis di kawasan Arek memiliki LQ dibawah 2,77.
- b. Indikator kemandirian daerah dapat dilihat dari besarnya derajat desentralisasi fiskal suatu daerah. Rata-rata derajat desentralisasi fiskal tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya sebesar 60%, diikuti oleh Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik masing-masing sebesar 32% dan 30%. Untuk 9 kabupaten/kota lainnya tergolong dalam kemampuan keuangan yang rendah sekali, yang nilainya diantara 0 sampai 25%.
- c. Indeks Kapasitas Fiskal daerah (IKFD) di kawasan Arek yang termasuk dalam kategori sangat tinggi antara lain Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan. IKFD yang masuk dalam kategori tinggi adalah Kota Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Kota Mojokerto dan Kota Batu masuk dalam kategori kapasitas fiskal daerah yang sedang. Sedangkan, Kota Pasuruan termasuk wilayah yang IKFD-nya rendah.

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kawasan Arek mengoptimalkan potensi pendapatan yang memiliki LQ tinggi sebagai sumber penerimaan pajak untuk kegiatan produktif. Karena masih banyak daerah yang derajat desentralisasi fiskal rendah, maka perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari potensi ekonomi yang ada agar tidak terlalu banyak menggantungkan pada transfer dari pemerintah pusat. Besar kecilnya Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) yang merupakan gambaran kemampuan keuangan daerah bergantung pada besarnya PAD,

dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh 11 Kabupaten/kota yang ada di Kawasan Arek. Namun, kemampuan keuangan daerah yang ada tidak diimbangi dengan memperluas basis pajak baru yang berguna untuk membiayai pengeluaran pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Indonesia. (2022). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2020-2021 Buku 1 Sumatera, Jawa. Diakses dari <https://www.bps.go.id>.
- , (2021). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2019-2020 Buku 1 Sumatera, Jawa. Diakses dari <https://www.bps.go.id>.
- , (2020). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2018-2019 Buku 1 Sumatera, Jawa. Diakses dari <https://www.bps.go.id>.
- , (2020). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2018-2019 Buku 1 Sumatera, Jawa. Diakses dari <https://www.bps.go.id>.
- , (2019). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2017-2018 Buku 1 Sumatera, Jawa. Diakses dari <https://www.bps.go.id>.
- BPS Provinsi Jawa Timur (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2017 - 2021. Diakses dari <https://jatim.bps.go.id>.
- , (2022). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2017 - 2021. Diakses dari <https://jatim.bps.go.id>.
- , (2022). Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2022. Diakses dari <https://jatim.bps.go.id>.
- Fitri, Chrismoni. Lindu. Sabrianti & Prabowo, Prayudi. Setiawan. (2021). Analisis Sektor Potensial Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kota Mojokerto Tahun 2014 - 2018. *Independent Journal of Economics*, 1(2), 218-230.
- Hakim, Ahmad. Dzikrul., Qomariyah, Siti. Nur., & Susanti, Ambar. (2020). Identifikasi Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Wilayah Di Kabupaten Jombang Dengan Pendekatan LQ, DLQ, Shiftshare. *Agrosaintifika: Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian*, 3(1), 169-177.
- Halim, Abdul. (2004). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hariyoko, Yusuf & Puspaningtyas Anggraeny. (2020). Analisis Pengembangan Sektor Unggulan Kota Surabaya 2013 - 2018. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 110-116.
- Herdiyana, Deni. (2019). Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan (PKN)*, 1(1), 122-133.
- Indonesia, Republik. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Diakses dari www.jdih.kemenkeu.go.id.

- , (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.07/2020 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Diakses dari www.jdih.kemenkeu.go.id.
- , (2019). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.07/2019 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Diakses dari www.jdih.kemenkeu.go.id.
- , (2018). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.07/2018 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Diakses dari www.jdih.kemenkeu.go.id.
- , (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2017 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Diakses dari www.jdih.kemenkeu.go.id.
- , (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- , (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mahasesa, Rafi & Huda, Syamsul. (2022). Potensi Sektor Unggulan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, 5(1), 36-45.
- Mahmudi. (2020). *Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muljanto, Muhammad Agus. (2021). Analisis Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(2), 169-181.
- Rachman, Ircham. Adri. Nur. (2019). Analisis Sektor Unggulan Dalam Perekonomian Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. 7(2).
- Ristanti, Hani & Muljaningsih, Sri. (2022). Analisis Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten Gresik. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 816-823.
- Sistiana, Mega & Makmur, M. Hadi. (2014). Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Kota. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 12(1), 277-286.
- Sodik, Mas'ud, Mukhlis & Nurhayati, Indah. Dewi. (2008). Model Pengembangan Ekonomi Kota Malang. *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 332-347.
- Sutarto, Ayu, & Sudikan, Setya, Yuwana. (2008). *Pemetaan Kebudayaan di Provinsi Jawa Timur*. Jember: Biru Mental Spiritual Jatim dan Kompyawisda Jatim.
- Tiyaningsih, Andarini. Agus. (2009). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Malang Tahun 2004 - 2008. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 7(2), 85-100.
- Yogi, Pradono, & Aritenang, A. (2020). *Pengantar Ekonomika Wilayah Pendekatan Analisis Praktis*. Edisi Pertama. Bogor: ITB Press.
- Zaenurullah, Lutfi., Boedijono, & Suryawati, Dina. (2015). Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu Sebagai Daerah Otonom Baru. *E-SOSPOL* 2(1), 12-18.